

## **BAB V KESIMPULAN**

Kebijakan terkait larangan visa masuk yang diterapkan kepada tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim dunia, tepatnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika yang antara lain adalah Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Donald Trump memiliki alasan bahwa latarbelakang atas pembuatan kebijakannya tersebut mengenai permasalahan terror yang baru - baru ini terjadi seperti peristiwa terror yang melanda di beberapa tempat dan sangat merusak fasilitas umum masyarakat yakni di Jerman, Paris, Perancis, Inggris, Brusels, Orlando dan Dallas.

Melihat kilas balik pada peristiwa tragedi penyerangan gedung WTC pada 11 September 2001 silam yang memakan korban tewas sebanyak 2.977 jiwa dan korban luka sebanyak lebih dari 6.000 orang dan sangat melumpuhkan kegiatan masyarakat serta merusak fasilitas-fasilitas penting di Amerika Serikat pada saat itu. Diketahui bahwa sebanyak 15 orang dari total 19 orang yang telah menyabotase pesawat terbang yang digunakan untuk menabrak gedung WTC yang menjadi simbol kekuatan Amerika Serikat tersebut merupakan warga negara yang berasal dari Arab Saudi, namun mengapa dalam daftar larangan visa masuk Amerika Serikat yang dicetuskan oleh Donald Trump bahwa negara Arab Saudi tidak termasuk dalam daftar larangan. Fakta lain yang harus diketahui pula bahwa dalang dibalik serangan WTC 11 September 2001 adalah kelompok radikal yang bernama Al-Qaeda yang menjadi penanggungjawab atas peristiwa tersebut dan di mana pemimpin kelompok tersebut merupakan Osama bin Laden yang berkewarganegaraan Arab Saudi.

Peristiwa yang terjadi pada penyerangan WTC di pada saat itu adalah peristiwa ketika George W. Bush yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Karena tragedi serangan terror tersebut muncullah kebijakan mengenai *War*

*On Terror* atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Counterterrorism*” yang dideklarasikan Bush. Dari peristiwa serangan terror tersebut kemudian muncul kebijakan mengenai visa pada era Bush junior, Kebijakan George W. Bush yang kerap dinyatakan diskriminatif terhadap dunia islam tercermin dalam hal pengurusan visa, seperti misal saat mengeluarkan regulasi pemberian visa melalui syarat-syarat yang khusus untuk negara-negara tertentu, terutama dari negara muslim atau berkependudukan mayoritas muslim yakni harus menunggu selama 20 hari untuk mendapatkan visa, terlebih untuk laki-laki muslim yang berusia 18 hingga 40 tahun. Nyatanya waktu normal dalam mengurus visa Amerika Serikat hanya memakan waktu selama 14 hari (2 minggu). Adanya dugaan bahwa persoalan nama yang terdapat unsur islami menjadi kendala untuk masuk Amerika Serikat. Beberapa nama seperti yang dialami oleh warga negara Perancis tetapi namanya islami yaitu Said Mahrane dan Mohamed Youcef Mami.

Kemudian kebijakan di era kepemimpinan Barack Obama yang masih melanjutkan beberapa kebijakan dari pemimpin Amerika di era sebelumnya yaitu Bush antara lain mengenai perang terhadap upaya memburu pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda Osama bin Laden. Obama tetap bertekad untuk melanjutkan dan memenangkan perang di Afghanistan yang telah berlangsung selama delapan tahun. Adanya dua hal yang membuat Amerika Serikat memutuskan untuk tetap melanjutkan perang, yaitu pertama negeri tersebut telah menjadi tempat persembunyian Osama dan menjadi wilayah kekuasaan Al-Qaeda yang dikendalikan oleh pejuang Taliban.

Program VWP telah menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat ekonomi dan memperbaiki keseimbangan perdagangan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa perubahan Program Pelepasan Visa bertujuan untuk mencegah masuknya teroris. Pada bulan

Januari 2012, Presiden Obama meminta perubahan pada VWP karena dampak ekonomi dari program dan tindakan imigrasi serupa terhadap ekonomi. Wisatawan dalam kategori berikut ini tidak memenuhi syarat untuk bepergian atau masuk ke AS berdasarkan program pelepasan visa (VWP). Warga negara VWP yang telah melakukan perjalanan ke atau pernah berkunjung di Iran, Irak, Sudan, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman pada atau setelah tanggal 1 Maret 2011 (dengan pengecualian terbatas untuk perjalanan tujuan diplomatik atau militer yang bertujuan untuk melayani negara VWP). Negara-negara VWP yang juga warga negara Iran, Irak, Sudan, atau Suriah. Selain itu pada tanggal 1 April 2016, harus memiliki paspor elektronik untuk menggunakan VWP.

Kemudian kebijakan yang diterapkan oleh Donald Trump terkait pelarangan visa terhadap tujuh negara mayoritas penduduk muslim dunia antara lain pada Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadikan alasan negara-negara tersebut masuk dalam daftar larangan. Kebijakan atas tidak berlakunya larangan visa terhadap Arab Saudi memiliki alasan yang antara lain, dengan mengambil kutipan dari daftar Terrorist Travel Prevention Act of 2015 di era kepemimpinan Obama sebagai pembenaran inti untuk opsi menentukan negara mana saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam daftar larangan, tetapi para kritikus mengatakan tentu adanya alasan yang lain yang melatarbelakangi hal tersebut. Arab Saudi diduga sebagai salah satu negara yang terlalu berharga sebagai sekutu bagi Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Adapun Arab Saudi telah melakukan perubahan yang dinilai besar dan mempunyai hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, tidak termasuknya Arab Saudi dalam daftar larangan tersebut juga dikarenakan presiden dan penasihatnya telah mencoba untuk menghindari konflik dengan mitra dagang yang begitu signifikan dan memiliki banyak keuntungan yang dapat membantu negara Amerika Serikat dalam berbagai sektor.

Dalam konteks politik dalam negeri kebijakan yang diberlakukan oleh Donald Trump tersebut di dukung oleh adanya kelompok kepentingan yaitu The U.S. Chamber of Commerce. Organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok kepentingan yang berpengaruh di Amerika Serikat, khususnya dalam bagaimana mereka berupaya untuk masuk dan mempengaruhi pembuatan kebijakan nantinya. Kelompok kepentingan ini adalah bentuk organisasi bisnis perdagangan terbesar di dunia yang berdiri sejak tahun 1912, yang mewakili lebih dari tiga juta pebisnis disegala macam bidang, sektor, dan region. Mereka itu merupakan pebisnis, berbagi satu hal yang sama, yakni mengandalkan The U.S. Chamber of Commerce ini untuk merepresentasikan suara mereka di Washington DC. Mereka berupaya dengan berbagai macam cara dan kesempatan untuk dapat meraih tujuannya yang salah satu faktor penentunya antara lain dengan keberhasilan untuk mempengaruhi segala kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat. Tidak hanya kelompok kepentingan yang mendesak adanya keputusan presiden namun ada pula disini Stephen Miller, selaku penasihat Presiden Amerika Serikat yang turut menyusun draft keputusan tersebut.

Arab Saudi memang sudah menjadi sumber minyak mentah terbesar kedua di Amerika, setelah Kanada. Amerika Serikat mengimpor sebanyak 1,3 juta barel minyak mentah Arab Saudi per harinya di bulan Februari, jumlah ini naik 32% dari tahun yang lalu. Ada pula bisnis Donald Trump yang berada di Arab Saudi sebanyak 8 bisnis yang terkait hotel di negara tersebut, sehingga hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi pada saat ini menjadi lebih baik dibawah pimpinan Donald Trump. Tidak hanya bekerjasama dalam hal sumber daya alam yang berupa minyak, namun Amerika Serikat juga memiliki kerjasama dengan negara Arab Saudi dalam hal jual-beli senjata, maka dari itu kedua negara ini memiliki hubungan yang saling timbal balik.

Dalam segi konteks internasional, kondisi letak geografis Arab Saudi yang berada di kawasan Timur Tengah dengan Amerika Serikat merupakan konteks yang membahas mengenai geopolitik. Politik luar negeri dalam perspektif Geopolitik Timur Tengah sendiri termasuk hubungan bilateral antar negara di dalam kawasan Timur Tengah dan dengan dunia internasional, di luar Arab dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Adanya kerjasama bilateral antara kedua belah pihak negara tersebut seperti halnya upaya dalam hal memerangi serta memberantas tindak terorisme di dunia. Tidak hanya dalam lokasi strategis yang dimiliki Arab Saudi, namun kekuatan yang dimiliki negara dengan kekayaan minyak tersebut pula memiliki persenjataan yang memadai.

Agenda memberantas terorisme tersebut menjadi kerjasama yang paling disorot dalam dunia internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku negara super power dan adidaya tersebut dengan negara di kawasan Timur Tengah tersebut yaitu Arab Saudi. Upaya yang dilakukan kedua negara ini merupakan perwujudan dalam menciptakan kondisi dunia yang damai, tertib, dan tentram. Arab Saudi pun telah melakukan perubahan yang begitu besar dan mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Itulah sebab mengapa Arab Saudi tidak termasuk dalam daftar negara yang dilarang. Dan juga karena presiden serta penasihatnya mencoba menghindari konflik dengan mitra dagang yang signifikan tersebut.